



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
SALINAN**

**KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 183 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**TIM PENGELOLA DAN PENGEMBANGAN APLIKASI JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pengelolaan dan pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta penambahan anggota Tim Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dari Badan Pembinaan Hukum dan Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu dibentuk Tim Pengelola dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pengelola dan Pengembangan Aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
  2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
  3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 207);
  4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENGELOLA DAN PENGEMBANGAN APLIKASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola dan Pengembangan Aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (yang selanjutnya disebut Tim Pengelola dan Pengembangan Aplikasi JDIH LKPP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola dan Pengembangan Aplikasi JDIH LKPP sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pengumpulan, penyimpanan, pengelolaan, pembaruan, penyebarluasan, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum yang diterbitkan oleh LKPP dan Kementerian/Lembaga lainnya, serta Pemerintah Daerah;
- b. mengembangkan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan *website* Pusat JDIH Nasional;
- c. melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap pengelolaan JDIH LKPP;
- d. melakukan pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Pengelola JDIH;
- e. melakukan koordinasi dan konsultasi pengelola JDIH dengan Pusat JDIH Nasional dan anggota JDIH Nasional lainnya; dan
- f. menyusun dan menyampaikan laporan pengelolaan JDIH setiap tahun di bulan Desember kepada Pusat JDIH Nasional.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Tim Pengelola dan Pengembangan Aplikasi JDIH LKPP bertanggung jawab kepada Kepala LKPP.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 124 Tahun 2023 tentang Tim Pengelola dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 April 2024  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

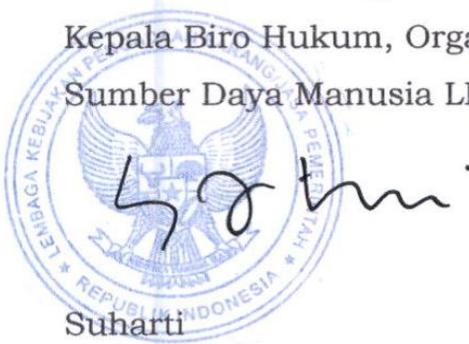
HENDRAR PRIHADI

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;  
dan
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum, Organisasi dan  
Sumber Daya Manusia LKPP,



Suharti

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
TENTANG TIM PENGELOLA DAN  
PENGEMBANGAN APLIKASI  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 183 TAHUN 2024

TANGGAL : 16 April 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENGELOLA DAN PENGEMBANGAN APLIKASI JDIIH LKPP**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>
1	Penanggung Jawab	Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2	Pengarah	1. Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 3. Kepala Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
3	Ketua Tim	Yogie Prastiyans
4	Anggota	1. Rinaldi Morintosh 2. Rasmita Juliana Sitepu 3. Inamawati Mastuti Dewi 4. Dede Agustina Muhajirin 5. Hendarwan Suryandaru 6. Rinatri Rahmayanti 7. Asih Riska Nurmasari

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA/ JABATAN</b>
		8. Carolina Anggreini 9. Mexi Osmond Soyan 10. Agus Kurdi Wijaya 11. Aprilia Pratiwi 12. Apriliansyah Ariyoga 13. Muhamad Bayu Firmansyah

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI